

Pengaruh Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Dan Kapasitas Keuangan Daerah Terhadap Keterpilihan Kepala Daerah *Incumbent* Pada Pemilukada

Jenis sesi paper : Full Paper

Fitra Dharma
Universitas Lampung
fitradharma@gmail.com

Dwi Martani
Universitas Indonesia
dwimartani@yahoo.com

Abstract : The purpose of the study is to analyze whether municipal government performance and the municipal financial capacity affect the winning of district head or major on local election. Using logistic regression analysis with a sample of 217 local government found that the municipal government performance with ekppd as proxy and municipal financial capacity affect the winning of the incumbent.

Keywords : ekppd, kinerja, kapasitas keuangan daerah, keterpilihan incumbent

1. Pendahuluan

Pada organisasi sektor publik termasuk pemerintah lokal yang kepemimpinannya dipilih melalui pemilihan umum, kinerja menjadi faktor yang mempengaruhi keterpilihan walikota *incumbent* pada pemilihan umum (Ingram dan Copeland, 1981; Happy, 1992; Brender, 2003; James dan John, 2006; Boyne *et al.*, 2009; Ferraz dan Finan, 2011). Kinerja pada sektor publik menurut Handler *et al.*, (2006) adalah hasil dari suatu aktivitas pada area tertentu, penjumlahan dari sejumlah atau seluruh bidang kegiatan organisasi publik. Kinerja tidak semata-mata dinilai dengan indikator keuangan, tetapi juga dengan kualitas pelayanan yang diberikan (Brender, 2003). Organisasi sektor publik seperti pemerintah daerah dipengaruhi oleh faktor politik dan mempunyai kewajiban untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat, dan tidak mencari laba sehingga indikator kinerja keuangan harus menyelaraskan dengan karakter tersebut (Ryan *et. al.* 2000).

Riset Ingram dan Copeland (1981) menunjukkan bahwa informasi kinerja keuangan pada laporan akuntansi pemerintah kota di Amerika Serikat dapat menjelaskan perilaku pemilih pada pemilihan walikota. Brender (2003) juga membuktikan bahwa kinerja fiskal selama periode pemerintahan pada pemerintah lokal di Israel berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum walikota. Defisit anggaran yang tinggi, hutang yang tinggi, akumulasi hutang yang tinggi menurunkan kemungkinan walikota untuk terpilih kembali (Brender, 2003).

Kinerja di bidang ekonomi terutama kinerja pendapatan menunjukkan pengaruh positif terhadap hasil pemilihan *incumbent* di negara negara federasi Kanada dan pengaruh negatif tingkat inflasi dan pengangguran dan pajak terhadap hasil pemilihan umum *incumbent* (Happy, 1992). Kinerja pelayanan publik yang buruk berpengaruh negatif terhadap keterpilihan *incumbent* pada pemerintah lokal di Inggris pada pemilihan umum (James dan John, 2006 dan Boyne *et al.*, 2009).

Riset mengenai pengaruh kinerja *incumbent* terhadap keterpilihannya lebih banyak mengenai kinerja ekonomi dan fiskal (Happy, 1992, Mughan dan Lacy, 2002, Brender, 2003). Riset yang menguji penerapan *new public management* dengan melihat pengaruh kinerja pelayanan publik terhadap keterpilihan *incumbent* baru dilakukan oleh James dan John (2006) dan Boyne *et al.*, (2009) pada pemerintah lokal di Inggris dan belum dilakukan pada pemerintah daerah di Indonesia. Riset mengenai respon masyarakat terhadap kinerja pemerintah perlu dilakukan dalam riset akuntansi sektor publik karena kinerja merupakan hasil dari aktivitas pengelolaan manajemen publik (James dan John, 2006). Aktivitas pengelolaan manajemen publik dilakukan melalui pelaksanaan anggaran (Copley, 2011). Kinerja merupakan hasil dari pelaksanaan anggaran dalam periode tertentu.

Pemilihan umum kepala daerah memberikan kesempatan bagi rakyat pemilih untuk mempertahankan atau menolak kebijakan politisi atau kepala daerah *incumbent* dan menilai kinerja partai penguasa atau kepala daerah (Brender dan Drazen, 2013). Menurut *retrospective voting theory*, para pemilih akan menilai politisi *incumbent* termasuk kepala daerah pada pemilihan umum berdasarkan peristiwa masa lalu, kinerja masa lalu dan tindakan masa lalu (Key, 1966 dalam Berry dan Howell, 2007).

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara keseluruhan yang diukur melalui evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi keterpilihan kepala daerah *incumbent*. EKPPD merupakan penilaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Tinggi-rendahnya skor EKPPD menunjukkan bagaimana pemerintah daerah melakukan perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan pencapaian kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai berarti penyelenggaraan pemerintah daerah semakin baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat daerah.

James dan John (2006) menemukan bahwa kinerja pelayanan yang buruk akan berpengaruh negatif terhadap perolehan suara *incumbent* pada pemilihan umum. Riset Boyne *et al.* (2009) menunjukkan bahwa kinerja pelayanan secara keseluruhan berpengaruh terhadap dukungan politik. Nilai EKPPD pemerintah daerah kemungkinan akan berpengaruh terhadap keterpilihan kepala daerah *incumbent*.

Selain kinerja penyelenggaraan pemerintah, kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan kemungkinan juga berpengaruh terhadap keterpilihan kepala daerah *incumbent*. Kapasitas keuangan merupakan kemampuan anggaran suatu daerah membiayai proses pembangunan setelah dikurangi dengan belanja kepegawaian yang menjadi kewajibannya.

Semakin tinggi kapasitas keuangan pemerintah untuk membiayai pembangunan daerah semakin mudah kepala daerah menggunakan anggaran untuk meningkatkan kinerja daerahnya dan semakin leluasa untuk membuat program yang menguntungkan masyarakat dan kepentingan politiknya. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2013, rata-rata kapasitas keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk pembangunan dan pelayanan hanya sebanyak 49,07% karena anggaran belanja pemerintah daerah banyak dihabiskan untuk belanja pegawai. Kemampuan keuangan memiliki pengaruh terhadap keterpilihan kepala daerah *incumbent*, riset Ingram dan Copeland (1981) menunjukkan bahwa walikota di USA yang memiliki kesulitan keuangan sehingga menurunkan belanja untuk layanan masyarakatnya mengalami kekalahan dalam pemilihan umum.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan kapasitas keuangan daerah berpengaruh terhadap keterpilihan kepala daerah *incumbent* pada pemilukada. Riset kuantitatif mengenai pengaruh kinerja pemerintah daerah terhadap keterpilihan kepala daerah *incumbent* belum banyak dilakukan di Indonesia mengingat pemilihan langsung kepala daerah baru beberapa tahun dilakukan di Indonesia. Riset mengenai pengaruh kinerja terhadap keterpilihan *incumbent* dengan di luar Indonesia lebih banyak menggunakan ukuran kinerja ekonomi dan fiskal. (Happy, 1992, Brender, 2003).

Berbeda dengan riset lain yang berfokus pada kinerja ekonomi dan fiskal, penelitian ini berkontribusi dengan menguji pengaruh kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan skor EKPPD yang dikeluarkan kemendagri. Juga memberi kontribusi dengan menguji apakah kapasitas keuangan daerah yang menjadi indikator kemampuan daerah membiayai pembangunannya berpengaruh terhadap keterpilihan kepala daerah *incumbent*. Temuan riset ini diharapkan memberikan kontribusi secara empiris bahwa masyarakat pemilih bersikap rasional yang akan memberi respon positif melalui pemilukada dengan memilih kembali kepala daerah *incumbent* ketika kinerja pemerintah daerah dinilai baik dan kemampuan keuangan daerah cukup untuk melakukan pembangunan di daerah.

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 New Public Management (NPM)

New public Management (NPM) adalah konsep pengelolaan organisasi di sektor publik yang mengadopsi manajemen sektor korporasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi sektor publik dengan menekankan pada pengukuran output dan akuntabilitas organisasi (termasuk suborganisasi) untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan (Hood, 1995). Akuntansi merupakan bagian tak terpisahkan dari *New public Management* (Watkins dan Arrington, 2007). NPM menggunakan konsep manajerial dan ekonomi dari sektor swasta seperti indikator kinerja, sistem informasi manajemen keuangan, target keuangan dan alokasi anggaran (Pettersen, 1999).

Penerapan sistem pelaporan akuntansi baru yang merupakan salah satu penerapan *new public management* pada pemerintah propinsi di Indonesia juga meningkatkan kinerja organisasi pemerintah

propinsi di Indonesia (Harun dan Kamase, 2012). Penerapan *New Public Management* (NPM) pada pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum akan berkaitan dengan politik (Pollitt dan Bouckaert, 2011;10). Riset James dan John (2006) menemukan bahwa penilaian kinerja menyeluruh (*Comprehensive Performance Asessments*) pada pemerintah lokal di Inggris berpengaruh terhadap perolehan suara *incumbent* pada pemilihan umum, terutama adalah kinerja buruk otoritas lokal berpengaruh negatif terhadap perolehan suara *incumbent*. Penerapan NPM akan memiliki konsekuensi politik. Kinerja yang merupakan hasil dari aktivitas pengelolaan manajemen publik akan berpengaruh terhadap keterpilihan *incumbent* pada pemilihan umum (James dan John, 2006).

2.2 *Retrospective Voting Theory*

Retrospective voting didefinisikan sebagai strategi pemilih dengan melihat kebelakang mengenai kinerja politisi *incumbent* apakah telah memenuhi atau melampaui standar yang diberikan (Reed dan Cho, 1998). Berdasarkan *retrospective voting*, masyarakat pemilih akan memilih kembali politisi *incumbent* pada saat pemilihan umum berdasarkan persepsi dari kinerja masa lalu yang dilakukan partai dan kandidat *incumbent* dalam mengelola pemerintahan (Campbell *et al.*, 2010). Kinerja masa lalu *incumbent* digunakan pemilih untuk memprediksi kinerja masa depan *incumbent* (Fiorina, 1981 dalam Campbell *et al.*, 2010). *Incumbent* akan dipilih kembali bila kinerjanya memenuhi atau melebihi standar kinerja yang diharapkan pemilih dan tidak akan terpilih kembali bila kinerjanya dipersepsikan buruk. Pemilih sebagai prinsipal akan menggunakan *retrospective voting* dalam memilih agen mereka pada pemilihan umum (Francis *et al.*, 1994)

Rakyat pemilih merupakan individu rasional dan pemilihan umum merupakan metode seleksi rakyat atas politisi akan menjadi pemegang kekuasaan pemerintah. Rakyat pemilih akan memilih pemerintah yang memberikan manfaat bagi dirinya (Downs, 1957). Jika pemerintah pada periode kepemimpinannya memiliki ekonomi kinerja yang baik, pemilih akan menghargai dengan memilih kembali, sedangkan pemerintah dengan kinerja buruk maka rakyat pemilih akan menghukum dengan tidak memilih kembali pada pemilihan umum (Johnson dan Ryu, 2010). *Retrospective voting* dapat

terkait dengan isu non ekonomi, tetapi banyak literatur yang fokus terhadap kinerja ekonomi seperti inflasi, pendapatan, pengangguran (Kiewiet dan Rivers, 1984). Pemilih menurut *retrospective voting theory* akan memilih kembali kepala daerah *incumbent* dari kinerja dan aktivitas pada periode kepemimpinannya dan akan menghukum *incumbent* yang memiliki kinerja dan aktivitas yang buruk dengan tidak memilihnya kembali.

2.3 Kinerja Pemerintah Daerah

Riset yang dilakukan Goddard (2005) menemukan bahwa penerapan NPM meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah lokal di Inggris. Budding (2004) melakukan penelitian terhadap kinerja pemerintah daerah Belanda menggunakan metode *multiple field study* dengan mengumpulkan data series melalui wawancara *semi-structure* terhadap 19 manajer pemerintah daerah di Belanda dan 4 ahli. Penelitian Budding (2004) menunjukkan bahwa sikap manajer pemerintah daerah terhadap akuntabilitas dan ketidakpastian tergantung pada banyaknya informasi akuntansi yang digunakan. Kondisi organisasi seperti sikap atasan, iklim organisasi yang berorientasi pada hasil meningkatkan kinerja pemerintah. Manajer pemerintah kota yang menerapkan NPM lebih memperhatikan anggaran dibandingkan dengan manajer pemerintah kota yang tidak menerapkan NPM.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif ataupun kualitatif yang digunakan oleh organisasi profit ataupun non-profit. Lingkungan kerja dan tujuan organisasi berbeda antara perusahaan dan organisasi sektor publik membuat ukuran kinerja perusahaan tidak serta merta digunakan pada organisasi sektor publik (Ryan *et. al.* 2000). Organisasi sektor publik seperti pemerintah daerah dipengaruhi oleh faktor politik dan mempunyai kewajiban untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat, dan tidak mencari laba sehingga indikator kinerja keuangan harus menyelaraskan dengan karakter tersebut (Ryan *et. al.* 2000). Kinerja tidak semata-mata dinilai dengan indikator keuangan, tetapi juga dengan kualitas pelayanan yang diberikan (Brender, 2003). Konteks pemerintah daerah berarti kinerja pemerintah daerah adalah hasil aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada bidang tertentu yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

James dan John (2006) membuktikan bahwa kinerja pelayanan publik sebagai salah satu pelaksanaan konsep *new public management* di Inggris berpengaruh terhadap perolehan suara pada pemerintah lokal di Inggris. Hasil penelitian James dan John (2006) menunjukkan bahwa kinerja pelayanan yang buruk yang diukur dengan *Comprehensive Performance Assessment* (CPA) berpengaruh negatif terhadap perolehan suara, tetapi tidak berpengaruh signifikan pada kinerja pelayanan yang baik.

Riset Ingram dan Copeland (1981) menemukan bahwa informasi akuntansi laporan keuangan pemerintah kota di Amerika Serikat dapat menjelaskan keterpilihan *incumbent* walikota yang mengikuti pemilihan untuk periode keduanya terutama ketika dikaitkan dengan variabel sosio-demografi. Empat jenis informasi akuntansi pemerintah kota yakni *service mix*, *funds flow relationship* dan rasio utang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku pemilih untuk memilih walikota *incumbent*.

Happy (1992) melakukan penelitian pada pemilihan umum negara-negara federasi di Canada menemukan bahwa kinerja ekonomi dan kinerja fiskal menunjukkan pengaruh terhadap hasil pemilihan *incumbent*. Pemilih merespon keadaan ekonomi yakni inflasi dan tingkat pengangguran karena berkaitan dengan pendapatan pemilih. Tingkat inflasi pengangguran dan pajak yang tinggi berpengaruh negatif terhadap hasil pemilihan umum *incumbent*. Peningkatan pendapatan pemilih berpengaruh positif terhadap hasil pemilihan umum untuk *incumbent*.

Brender (2003) melakukan penelitian pengaruh kinerja fiskal pemerintah lokal di Israel terhadap hasil pemilihan umum walikota pada tahun pemilihan 1989, 1993 dan 1998. Riset Brender (2003) menemukan bahwa kinerja pemerintah daerah yakni hutang, perubahan hutang, saldo kas, efektivitas penerimaan pajak, upah buruh, kinerja pendidikan dan pengeluaran pembangunan berpengaruh terhadap keterpilihan *incumbent* walikota di Israel. Tetapi dari tiga waktu pemilihan walikota yang dilakukannya hanya pemilihan walikota pada tahun 1998 yang berpengaruh signifikan, kinerja pemerintah daerah tidak signifikan berpengaruh pada pemilihan walikota di tahun 1989 dan 1993. Menurut Brender (2003), defisit anggaran yang tinggi, hutang yang tinggi, akumulasi hutang yang tinggi menurunkan kemungkinan walikota untuk terpilih kembali. Brender (2003) juga menemukan

bahwa kinerja pendidikan berpengaruh terhadap keterpilihan *incumbent* walikota di Israel. Kinerja pendidikan menjadi perhatian bagi orang tua di Israel karena nilai siswa kelas 12 (dua belas) pada ujian nasional menjadi salah satu penentu untuk ikut penilaian matrikulasi masuk perguruan tinggi dan digunakan untuk seleksi karyawan. Proporsi siswa di daerah yang berhak untuk ikut penilaian matrikulasi masuk perguruan tinggi menjadi indikator kesuksesan pemerintah lokal di Israel. (Brender, 2003)

Boyne *et al.* (2009) melakukan penelitian hubungan kinerja pelayanan publik pemerintah lokal di Inggris dengan dukungan politik pada pemilihan umum lokal. Ukuran kinerja dalam penelitian Boyne *et al.* (2009) adalah pertama; skor kinerja pelayanan publik (*Service Performance Score*) yang berkaitan dengan informasi kinerja manajerial pemerintah daerah (*Managerial Performance information*) dan Nilai indikator kinerja (*Value Performance Indicator*) berkaitan dengan tugas utama otoritas lokal seperti pendidikan, perumahan, pelayanan sosial, transportasi, dan kebersihan dengan nilai skor 0-100. Skor kinerja pelayanan publik (*Service Performance Score*) tersebut diperiksa akurasinya oleh Komisi Audit. Kedua adalah *Comprehensive Performance Assesement* (CPA) yang diambil dari skor pelayanan publik ditambah penilaian oleh komisi audit untuk pemerintah lokal Inggris. Temuan riset Boyne *et al.* (2009) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap ekonomi daerah sehingga kinerja ekonomi daerah berpengaruh terhadap dukungan politik *incumbent* walikota pada pemilihan umum lokal (Boyne *et al.*, 2009).

Penerapan NPM pada organisasi sektor publik membuat organisasi berjalan secara efektif mencapai tujuan. Reformasi Indonesia membuat pemerintah daerah Indonesia lebih demokratis, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Kepala daerah pada awal masa kepemimpinannya membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah setiap tahun dinilai oleh pemerintah pusat. Berdasarkan peraturan pemerintah no 6 tahun 2008, pemerintahan daerah membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah pusat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah pusat.

Pemerintah pusat melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang merupakan proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) merupakan ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang menyeluruh yang menggambarkan pencapaian kerja yang dilakukan kepala daerah bersama jajarannya.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Metode penilaian EKPPD menggunakan total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Total Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi; indeks capaian kinerja; indeks kesesuaian materi. Indeks capaian kinerja dinilai berdasarkan indeks kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan pada aspek tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.

2.4 Kapasitas Keuangan Daerah

Berdasarkan lampiran peraturan menteri dalam negeri no 54 tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu memahami kapasitas keuangan daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Kapasitas keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pembangunannya dengan APBD kabupaten/kota setelah dikurangi belanja wajib yang menjadi prioritas. Semakin tinggi kapasitas keuangan daerah maka akan semakin mudah mengalokasikan anggaran pada berbagai urusan yang menjadi kewajiban dan pilihan pemerintah daerah.

Proporsi kapasitas keuangan daerah yang tinggi memudahkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran demi mencapai kinerja ataupun mengalokasikan anggaran untuk kepentingan politik kepala daerah. Menurut data dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) seluruh pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia yang berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun

2010-2013, rata-rata kapasitas keuangan pemerintah kabupaten/kota adalah 49,07%. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kabupaten/kota di Indonesia mengalokasikan anggaran belanja pegawai sebesar 50,93% dari seluruh anggaran belanjanya. Kapasitas keuangan daerah menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik di kabupaten / kota masing-masing.

Riset Ingram dan Copeland (1981) menunjukkan bahwa pemerintah kota di Amerika Serikat dengan kemampuan keuangan rendah yang mengalami kesulitan keuangan yang ditandai dengan meningkatnya rasio utang jangka panjang membuat walikota *incumbent* mengalami kekalahan dalam pemilihan umum lokal. Masyarakat pada kota yang mengalami peningkatan utang jangka pendek akan mempersepsikan bahwa walikota melakukan pengelolaan fiskal yang buruk sehingga tidak mampu meningkatkan pelayanan kesehatan dan jalan raya bagi masyarakat karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah (Ingram dan Copeland, 1981). Peningkatan utang jangka pendek menunjukkan bahwa kota tersebut memiliki kapasitas keuangan daerah yang lemah sehingga tidak mampu memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakat.

2.5 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Keterpilihan Incumbent

Berdasar UU no 22 tahun 1999 maka di daerah dibentuk Dewan perwakilan Rakyat (DPRD) sebagai badan legislasi daerah dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. Pada tahun 2004, Undang undang mengenai pemerintah daerah direvisi menjadi UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Berdasar UU no 32 tahun 2004 ini, DPRD tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah, baik dilevel propinsi ataupun kabupaten/kota dipilih secara langsung oleh rakyat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Menurut Pollitt dan Bouckaert (2011;178), merujuk penelitian Green-Pedersen, 2002 hasil pemilihan umum di Swedia dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat memilih “pelayanan publik” daripada penurunan pajak. Penerapan *New Public Management* (NPM) di Swedia, didukung oleh partai Sosial Demokrat yang sedang berkuasa karena menguntungkan partai pada pemilihan umum (Green-Pedersen, 2002). Informasi kinerja pelayanan publik memiliki konsekuensi politik, pemilih dapat

menggunakan informasi kinerja untuk menghukum ataupun menghargai kepala daerah *incumbent* melalui pemilihan umum (James dan John, 2006)

Perilaku pemilih pada pemilihan umum menurut Downs (1957) didasarkan atas rasionalitas ekonomi sehingga individu akan termotivasi oleh kepentingan ekonomi sendiri (*economic self interest*) dan politisi termotivasi untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya, sehingga politisi akan membuat kebijakan yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat pemilih sebagai kepentingannya. Pemilih akan menganggap bahwa kondisi ekonomi menjadi tanggung-jawab politisi pemerintah yang berkuasa, sehingga pemerintah daerah dengan kebijakan ekonomi yang sukses akan dipilih kembali sebagai bentuk penghargaan dan pada kondisi ekonomi yang buruk maka rakyat pemilih akan memberi hukuman kepada politisi dengan tidak memilihnya kembali (Downs, 1957). Kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat merupakan politisi daerah. Politisi termasuk kepala daerah pada sistem demokrasi akan membuat kebijakan yang akan membuatnya terpilih kembali (Downs, 1957). Menurut *retrospective voting theory*, rakyat akan mengapresiasi *incumbent* yang memiliki kinerja baik dengan memilihnya kembali pada pemilihan umum.

Kinerja ekonomi *incumbent* menjadi isu penting dalam pemilihan umum yang menjadi perhatian para pemilih (Happy, 1992). Riset pada pemilihan umum di negara federasi di Kanada menunjukkan bahwa kinerja ekonomi dan fiskal berpengaruh terhadap perilaku pemilih (Happy, 1992). Pada pemilihan umum walikota di Israel, juga membuktikan bahwa kinerja ekonomi dan fiskal walikota berpengaruh terhadap keterpilihan *incumbent* walikota (Brender, 2003). Pemilih walikota di Israel cenderung memerhatikan isu kinerja ekonomi lokal walikota (Brender, 2003). Kinerja ekonomi pemerintah menurut masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah (Downs, 1957).

2.6 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan Keterpilihan Incumbent

James dan John (2006) menemukan bahwa kinerja pelayanan yang buruk akan berpengaruh negatif terhadap perolehan suara *incumbent* pada pemilihan umum. Boyne *et al.* (2009) juga menemukan bahwa kinerja pelayanan publik pemerintah lokal di Inggris berpengaruh terhadap dukungan politik pada pemilihan umum lokal. Kinerja pelayanan publik Boyne *et al.* (2009) terdiri atas kinerja

pelayanan, kinerja manajerial dan kinerja komprehensif yang berkaitan dengan tugas utama walikota yang dinilai oleh lembaga di luar pemerintah lokal tersebut.

Pemerintah Indonesia juga melakukan penilaian terhadap pemerintah daerah yang berada dibawahnya. Peraturan pemerintah no 6 tahun 2008 merupakan pedoman untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasar PP no 6 tahun 2008 maka pemerintahan daerah di Indonesia membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah pusat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah pusat.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.

Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) merupakan ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang menyeluruh yang dapat menggambarkan pencapaian kerja yang dilakukan kepala daerah bersama jajarannya. Tinggi-rendahnya skor EKPPD menunjukkan pencapaian yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai berarti penyelenggaraan pemerintah daerah semakin baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat daerah.

Peneliti berargumen bahwa nilai EKPPD yang tinggi menunjukkan keberhasilan kepala daerah melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan mampu memberi dampak positif bagi rakyat. Rakyat yang merasakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah baik dan memberi manfaat bagi mereka akan memberi penghargaan dengan memilih kembali kepala daerah *incumbent*. Sehingga peneliti berargumen bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai menggunakan EKPPD berpengaruh positif terhadap kemungkinan keterpilihan kepala daerah *incumbent*.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Kinerja penyelenggaraan pemerintahan berpengaruh positif terhadap kemungkinan keterpilihan kepala daerah incumbent.

2.7 Kapasitas Keuangan Daerah dan Keterpilihan Incumbent

Kapasitas keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pembangunannya dengan APBD kabupaten/kota setelah dikurangi belanja wajib yang menjadi prioritas. Semakin tinggi kapasitas keuangan daerah maka akan semakin mudah mengalokasikan anggaran pada berbagai urusan yang menjadi kewajiban dan pilihan pemerintah daerah.

Riset Ingram dan Copeland (1981) menunjukkan bahwa daerah yang mengalami kesulitan keuangan yang ditandai dengan meningkatnya rasio utang jangka panjang dan turunnya anggaran kesehatan dan anggaran jalan raya membuat walikota *incumbent* mengalami kekalahan dalam pemilihan umum lokal. Masyarakat pada kota yang mengalami peningkatan utang jangka pendek akan mempersepsikan bahwa walikota melakukan pengelolaan fiskal yang buruk sehingga tidak mampu meningkatkan pelayanan kesehatan dan jalan raya bagi masyarakat karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah (Ingram dan Copeland, 1981).

Peneliti berargumen ketika semakin tinggi kapasitas keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan APBD selain belanja kepegawaian maka akan semakin mudah kepala daerah dengan kewenangan yang dimilikinya untuk mengalokasikan belanja daerah sesuai dengan kepentingan politiknya. Semakin rendah kapasitas keuangan daerah semakin sulit kepala daerah untuk mengalokasikan belanja untuk kepentingan politiknya. Sehingga peneliti berargumen bahwa kapasitas keuangan berpengaruh terhadap kemungkinan keterpilihan kepala daerah *incumbent* pada pemilukada.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Kapasitas keuangan berpengaruh positif terhadap keterpilihan kepala daerah incumbent.

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia yang proses pergantian kepala daerah melalui mekanisme pemilihan umum kepala daerah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria pemerintah daerah kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah setelah minimal 3 tahun setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tidak termasuk kabupaten/kota daerah otonomi baru (DOB) yang baru dimekarkan dan pertama kali melaksanakan pemilihan umum kepala daerah.

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data hasil penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) dari kemendagri. Sedangkan data kepala daerah *incumbent* yang mengikuti pemilihan umum kepala daerah untuk periode kedua berasal Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tahun pemilukada yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 2010, 2011 dan 2012.

Tabel 1
Hasil Pemilihan sampel

Keterangan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Total
Pemerintah daerah yang melakukan pemilukada	210	63	60	333
Dikurangi				
Pemilukada pemerintah propinsi	7	4	4	15
Jumlah	203	59	56	318
Di kurangi				
Pemilukada kab/kota tidak diikuti <i>incumbent</i>	41	26	27	94
Jumlah Pemilukada diikuti <i>incumbent</i>	162	33	29	224
Dikurangi				
Pemerintah kab/kota yang tidak lengkap datanya	5	2	0	7
Jumlah sampel	157	31	29	217

Tabel 1 menunjukkan hasil pemilihan sampel pada penelitian ini. Keseluruhan pemerintah daerah yang melaksanakan pemilukada pada tahun 2010-2012 berjumlah 333. Setelah dikurangi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang tidak diikuti *incumbent* pada pemilukadanya

dan dikurangi karena data-data yang tidak lengkap maka keseluruhan sampel penelitian ini adalah 217.

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian, pendefinisian yang jelas mengenai variabel penelitian harus dilakukan. Berikut ini adalah operasionalisasi variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

Variabel Independen

Kinerja Pemerintah Daerah, adalah hasil dari suatu aktivitas pada area tertentu atau penjumlahan dari sejumlah atau seluruh bidang kegiatan organisasi publik (pemerintah daerah) yang diukur baik secara absolut ataupun indeks dalam kaitannya dengan hasil setara dengan periode sebelumnya atau sektor lain (Handler *et al.*, 2006). Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah kabupaten kota di Indonesia digunakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan *proxy* penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) yang dikeluarkan oleh kemendagri. Skor EKPPD digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Nilai skor yang diberikan kepada masing-masing daerah berkisar dari angka 0 sampai dengan 4. Nilai skor kurang dari 1 maka pemerintah daerah diberi status kinerja “rendah”, nilai skor antara lebih dari 1 dan kurang dari 2 maka pemerintah daerah diberi status kinerja “sedang”, nilai skor lebih dari 2 dan kurang dari 3 diberi status “tinggi” dan nilai skor lebih dari 3 sampai 4 diberi skor “sangat tinggi”.

Kapasitas Keuangan Daerah, adalah kemampuan daerah untuk membiayai pembangunannya dengan APBD kabupaten/kota setelah dikurangi belanja wajib yang menjadi prioritas yakni belanja pegawai. Diukur dengan rasio dari total pendapatan ditambah total pembiayaan dibagi belanja pegawai. Total Pendapatan dan pembiayaan yang telah dikurangi belanja yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan kabupaten/kota bersangkutan.

Nilai KKD diperoleh dengan rumus sebagai berikut

$$KKD = 1 - \left(\frac{\text{total belanja pegawai}}{\text{total pendapatan} + \text{total Pembiayaan}} \times 100\% \right)$$

Variabel Dependen

Keterpilihan *Incumbent* (WIN) diukur dengan *dummy variable*; 1: terpilih/menang dalam pemilukada dan 0: tidak terpilih/kalah dalam pemilukada. Yang dimaksud dengan kepala daerah *incumbent* adalah kepala daerah yakni walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah pada kabupaten/kota yang dipimpinnya.

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah *size* yang diukur dari log total aset pemda, untuk melihat kompleksitas dan besaran pemda. Daerah untuk melihat perbedaan pemerintah kabupaten dan kota, diukur dengan *dummy variable* 1 untuk pemerintah kabupaten dan 0 untuk pemerintah kota.

3.3 Model Empiris

Model empiris penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi logit/probit sebagai berikut:

$$\text{Win}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Kinerja}_i + \beta_2 \text{KKD}_i + \beta_3 \text{Daerah}_i + \beta_4 \text{Size}_i + \varepsilon$$

Hipotesis penelitian dapat disajikan dalam bentuk statistik sebagai berikut:

Win Keterpilihan kepala daerah incumbent, diukur dengan *dummy variable*; 1: terpilih/menang dalam pemilukada dan 0: tidak terpilih/kalah dalam pemilukada.

Kinerja Skor kinerja pemda yang berasal dari nilai EKPPD yang dikeluarkan kemendagri

KKD Kapasitas Keuangan Daerah,

Variabel kontrol, terdiri dari dua yakni jenis pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah

Daerah Jenis pemerintah daerah, yang dibagi 2 yakni 1 adalah pemerintah kabupaten dan 0 adalah pemerintah kota. Pembagian dua jenis pemerintah daerah ini dikarenakan karakteristik masyarakat pada kabupaten dan kota berbeda.

Size log dari jumlah aset yang dimiliki pemerintah daerah, semakin banyak aset yang dimiliki, semakin besar dan kompleks organisasi pemerintah daerah. kabupaten/kota.

ε error

4. Hasil Dan Diskusi

4.1 Statistik Deskriptif

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) tahun 2010-2012 yang diikuti oleh kepala daerah incumbent yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 217 pemerintah daerah kabupaten kota yang terdiri dari 182 pemerintah kabupaten dan 35 pemerintah kota. Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif variabel-variabel untuk menguji keterpilihan kepala daerah *incumbent*.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	WIN	EKPPD	KKD	DAERAH	SIZE
Mean	0.608295	2.393509	0.507011	0.838710	28.09771
Median	1.000000	2.488900	0.486008	1.000000	28.06386
Maximum	1.000000	3.478700	0.827645	1.000000	31.11601
Minimum	0.000000	0.281100	0.260013	0.000000	21.30827
Std. Dev.	0.489260	0.501894	0.133604	0.368649	0.791083
Skewness	-0.443712	-1.151444	0.548950	-1.841822	-2.668604
Kurtosis	1.196881	4.894819	2.587938	4.392308	28.25859
Observations	217	217	217	217	217

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa rata-rata keterpilihan kepala daerah *incumbent* adalah 0,60829. Jika dikaitkan dengan 217 sampel pemilukada yang diikuti oleh kepala daerah incumbent berarti sebanyak 60,83% atau 132 kepala daerah *incumbent* memenangkan kontestasi pemilukada yang diikutinya, sedangkan sisanya sebanyak sebanyak 85 atau 39,17% kepala daerah *incumbent* yang mengikuti pemilukada kalah. Rata-rata nilai EKPPD adalah 2,393509 yang berarti rata rata nilai ekppd yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota dikategorikan rata-rata bestatus “tinggi”. Nilai tertinggi ekppd adalah 3,4787 dengan status “sangat tinggi” dan nilai terendah adalah 0,281 dengan status “rendah”.

Kapasitas keuangan daerah (KKD) rata-rata 0.507011 yang berarti rata-rata persentase anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk program pembangunan daerah diluar gaji

pegawai sebesar 50,7%. Nilai terendah KKD adalah 0,26 yang dialami oleh pemerintah kabupaten Klaten. Nilai 0,26 berarti hanya 26% anggaran belanja pemerintah kabupaten Klaten yang digunakan untuk program pembangunan, sisanya sebesar 74% APBD digunakan untuk membayar gaji pegawai. Nilai tertinggi KKD adalah 0,827 yang dialami oleh pemerintah kabupaten Bulungan. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 82,7% anggaran pemerintah kabupaten Bulungan digunakan untuk pembangunan dan sisanya digunakan untuk belanja gaji pegawai.

Nilai rata-rata variabel daerah adalah 0.838710. Variabel daerah adalah variabel kategori pemerintah kabupaten dengan nilai 1 dan pemerintah kota dengan nilai 0. Nilai rata-rata 0,838 dapat dimaknai bahwa 83,8% sampel penelitian ini merupakan pemerintah daerah dengan bentuk pemerintah kabupaten dan sisanya pemerintah kota. Size adalah log dari jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Semakin besar aset menunjukkan semakin tua dan kompleks pemerintah daerah tersebut. Rata-rata nilai size adalah 28,09771 dengan nilai tertinggi 31,11 dan terendah 21,30827.

4.2 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis 1 dan 2 dilakukan uji regresi logistik. Regresi logistik dilakukan karena jumlah pemenang lebih banyak dibandingkan dengan kepala daerah yang kalah dalam pemilukada.

Hipotesis satu menyatakan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan berpengaruh positif terhadap kemungkinan keterpilihan kepala daerah *incumbent*. Berdasarkan tabel 3 yang menjelaskan hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel ekppd yang menjadi *proxy* kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bernilai 0,841789 dengan probabilitas 0,0113 (lebih kecil dari alpha 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik hipotesis 1 didukung signifikan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi nilai EKPPD yang diperoleh oleh pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kemungkinan keterpilihan kepala daerah *incumbent*.

Nilai EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) adalah hasil dari proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nilai skor EKPPD yang semakin tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu

mencapai IKK (indikator Kinerja Kunci) yang telah ditetapkan baik pada tataran pengambil kebijakan ataupun pada tataran pelaksanaan kebijakan. Semakin tinggi skor berarti pemerintah daerah telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan kaidah perundang-undangan, melaksanakan SPM (standar pelayanan minimum), penataan kelembagaan yang baik, pengelolaan keuangan daerah yang wajar dan memberi fasilitasi bagi partisipasi masyarakat. Nilai skor ekppd menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran yang menghasilkan keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) sehingga ketika nilai skor ekppd semakin tinggi menunjukkan adanya dampak positif penyelenggaraan pemerintah bagi masyarakat. Ketika penyelenggaraan pemerintah berdampak positif bagi masyarakat maka hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih kembali kepala daerah *incumbent* yang maju pada kontestasi pilukada untuk periode kedua.

Temuan riset ini sejalan dengan temuan James & John (2006) bahwa penerapan konsep *new public management* akan berpengaruh terhadap keterpilihan incumbent pada pemilihan umum. Juga sejalan dengan *retrospective voting theory* bahwa pemilih menilai incumbent berdasarkan kinerja yang telah dilakukannya.

Hipotesis 2 menyatakan bahwa kapasitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kemungkinan keterpilihan kepala daerah incumbent. Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel kapasitas keuangan daerah (KKD) bernilai 3,5972 dengan probabilitas 0,003 (< dari alpha 0,01). Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik hipotesis 2 diterima signifikan. Temuan ini selaras dengan penelitian Ingram dan Copeland (1981) yang menemukan walikota di USA yang memiliki kesulitan keuangan mengalami kekalahan dalam pemilihan umum. Pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan yang lebih tinggi tentu lebih mudah mengalokasikan belanja yang dapat memberikan dampak positif bagi rakyat dibandingkan dengan pemerintah yang memiliki kemampuan keuangan terbatas.

Tabel 3 Hasil uji regresi logistik

Dependent Variable: WIN						
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)						
Included observations: 217						
QML (Huber/White) standard errors & covariance						
Variable	Hipotesa	Ekspektasi arah	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C			3.015332	4.974262	0.606187	0.5444
Kinerja EKPPD	H1	+	0.841789	0.332279	2.533375	0.0113
KKD	H2	+	3.597212	1.242911	2.894183	0.0038
DAERAH			0.257203	0.371741	0.691889	0.4890
SIZE			-0.235024	0.179415	-1.309943	0.1902
McFadden R-squared		0.052943		Mean dependent var		0.608295
S.D. dependent var		0.489260		S.E. of regression		0.476101
Akaike info criterion		1.314201		Sum squared resid		48.05459
Schwarz criterion		1.392079		Log likelihood		-137.5908
Hannan-Quinn criter.		1.345660		Deviance		275.1816
Restr. Deviance		290.5650		Restr. log likelihood		-145.2825
LR statistic		15.38341		Avg. log likelihood		-0.634059
Prob(LR statistic)		0.003969				
Obs with Dep=0		85		Total obs		217
Obs with Dep=1		132				

Keterangan: Kinerja EKPPD : kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah; KKD: Kapasitas Keuangan Daerah; *Daerah*: Bentuk pemerintah daerah (kabupaten/kota); *Size*: Besaran pemerintah daerah, log dari asset pmda.

Nilai probabilitas LR-statistik adalah 0,003 ($<\alpha$ 0,05) menunjukkan bahwa model regresi logistik yang menguji pengaruh kinerja penyelenggaraan pemerintah dan kapasitas keuangan daerah valid dan dapat diinterpretasikan. Nilai McFadden r-square (r-square pada regresi OLS biasa) adalah 0,05294 yang berarti variabel independen kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan kapasitas keuangan daerah menjelaskan kemungkinan pengaruh keterpilihan kepala daerah incumbent hanya 5%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

6. Kesimpulan, Implikasi Dan Keterbatasan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan kapasitas keuangan daerah berpengaruh terhadap keterpilihan kepala daerah *incumbent* pada pemilukada. Hasil menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diukur berdasarkan nilai ekppd (evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah) dan kapasitas keuangan daerah berpengaruh terhadap kemungkinan keterpilihan kepala daerah incumbent.

Hasil riset ini menunjukkan bahwa masyarakat pemilih merespon secara positif hasil kerja kepala daerah pada masa jabatannya, implikasi dari riset ini adalah kepala daerah harus melakukan hal-hal positif bagi masyarakat yang dipimpinnya bila ingin terpilih untuk periode kedua.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain

- a. Pemilihan umum kepala daerah di Indonesia baru dimulai tahun 2005 dan penilaian EKPPD dilakukan mulai tahun 2009 sehingga data penelitian ini adalah *cross section*.
- b. Nilai ekppd yang digunakan adalah nilai ekppd pada tahun pemilukada berlangsung, bukan merupakan nilai *incremental* selama periode kepemimpinan kepala daerah. Hal ini terjadi karena ekppd baru dilaksanakan mulai tahun 2009 sedangkan pemilukada yang digunakan adalah pemilukada 2010, 2011 dan 2012 sehingga tidak dapat diperoleh nilai ekppd selama 5 tahun kepemimpinan kepala daerah.
- c. Penelitian ini hanya mempertimbangkan faktor kinerja dan keuangan, tidak mempertimbangkan faktor politik yang justru terjadi saat pemilukada berlangsung. Penelitian berikutnya perlu memperhatikan faktor politik ketika menguji variabel kinerja terhadap keterpilihan *incumbent*.
- d. Tidak dilakukan uji robustness terhadap pengukuran kinerja.

Daftar Pustaka

- Boyne, G.A. & James O., John, Peter dan Petrovsky, N., (2009). "Democracy And Government Performance: Holding Incumbents Accountable In English Local Governments". *The Journal Of Politics*, Vol 71 (No 4):1273-1284.
- Brender, A., (2003). "The Effect Of Fiscal Performance On Local Government Election Results In Israel: 1989-1998". *Journal Of Public Economics*. 87. 2187-2205.
- Brender. A., & Drazen A., (2013) "Elections, Leaders, And The Composition Of Government Spending". *Journal Of Public Economics* 97, 18-31
- Budding, G.T., (2004). "Accountability, Environmental Uncertainty And Government Performance: Evidence From Dutch Municipalities". *Management Accounting Research*, Vol 15:285-304.
- Campbell, J.E., & Dettrey B.J., & Yin, H., (2010). "The Theory of Conditional Retrospective Voting: Does the Presidential Record Matter Less in Open-Seat Elections?". *The Journal of Politics*, Vol. 72, No. 4, Pp. 1083-1095
- Cooper, D., R & Schindler, Pamela, S (Ed), (2003). *Business Research Methods*: McGraw Hill.
- Downs, A., (1957). "An Economic Theory Of Political Action In A Democracy". *Journal Of Political Economy*, Vol. 65 (No 2 Apr):135-150.
- Francis W.L., & Kenny L.W., & Schmidt A.B., (1994). "Retrospective Voting and Political Mobility". *American Journal of Political Science*, Vol. 38 No 4 Nov hal 999-1024.
- Gujarati, D., 2010. *Basic Econometrics*. McGraw Hill, Boston.
- Green-Pedersen, C. (2002). "New Public Management Reforms of the Danish and Swedish Welfare States: The Role of Different Social Democratic Responses". *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, Vol. 15, No. 2; 271-294.
- Gruening, G., (2001). "Origin and Theoretical Basis of New Public Management". *International Public Management Journal* 4; 1-25.

- Handler H , B.K., P Reiss And M Schratzenstaller, (2006). "The Size And Performance Of Public Sector Activities In Europe: An Overview". *Acta Oeconomica*, Vol. 56 (4):399-422.
- Happy, J.R., (1991). "The Effect Of Economic And Fiscal Performance On Incumbency Voting: The Canadian Case". *British Journal Of Political Science*, No. 1:117-130.
- Hood, C., (1991). "A Public Management For All Season". *Public Administration*, Vol 69 (Spring):3-19.
- Harun, H., dan Kamase, H.P., (2012)."Accounting Change and Institutional Capacity: The Case of a Provincial Government in Indonesia". *Accounting Change & Institutional Capacity*. volume 6, no. 2.
- Hood, C., (1995). "The "New Public Management" In The 1980s: Variations On A Theme". *Accounting, Organization And Society*, Vol. 20 (No. 2/3):Pp. 93-109.
- Ingram, R.W., &Copeland, Ronald M, (1981). "Municipal Accounting Information And Voting Behavior". *The Accounting Review*, Vol 56 (4):830-843.
- James O., & John. P. (2006). "Public Management at the Ballot Box: Performance Information and Electoral Support for Incumbent English Local Governments". *Journal of Public Administration Research and Theory*, Volume 17, Issue 4 Pp. 567-580
- Jensen, M., &Meckling W. , (1976). "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, And Capital Structure". *Journal Of Financial Economics*, 3:305-360.
- Key, V. O., Jr. 1966. *The Responsible Electorate*. New York: Vintage. dalam Berry C.R. dan Howell W.G.(2007). "Accountability and Local Elections: Rethinking Retrospective Voting The Journal of Politics", Vol. 69, No. 3, pp. 844–858
- Kiewiet, Roderick D. (1983). *Macroeconomics and Micropolitics*. "Chicago: University of Chicago Press" dalam Svoboda, Craig J. (1995)."Retrospective Voting in Gubernatorial Elections: 1982 and 1998". *Political Research Quarterly*, Vol. 48, No. 1 (Mar.), pp. 135-150
- Kiewiet, D.R., dan Rivers, D., (1984)."A Retrospective On Retrospective Voting".*Political Behavior*, Vol. 6, No. 4, pp. 369-393
- Pollitt, Chistoper dan Bouckaert, Geert, (2011). *Public Management Reform, A Comparative Analysis—New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State*. "Oxford University Press," third edition.
- Reed, W.R., & Cho, J. (1998)."A Comparison Of Prospective And Retrospective Voting with Heterogeneous Politicians".*Public Choice* 96: 93–116
- Svoboda, Craig J. (1995). "Retrospective Voting in Gubernatorial Elections: 1982 and 1998". *Political Research Quarterly*, Vol. 48, No. 1 (Mar.), pp. 135-150
- Woon, J. (2012)."Democratic Accountability and Retrospective Voting:A Laboratory Experiment".*American Journal of Political Science*, Vol. 56, No. 4, October, Pp. 913–930